

Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kenya oleh UN Women pada Tahun 2020-2022

Nurul Azizah Salma, Renitha Dwi Hapsari
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan adalah permasalahan global yang melanggar hak asasi manusia serta bentuk diskriminasi gender di banyak negara, termasuk Kenya. Selain berdampak pada kesehatan dan ekonomi, pandemi COVID-19 juga menyebabkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kenya. Ini terjadi karena kebijakan lockdown, pembatasan sosial, dan faktor lain seperti masalah ekonomi, budaya patriarki, dan kesalahpahaman praktik budaya. Dampak kekerasan terhadap perempuan tidak hanya bersifat fisik, namun juga pada kesejahteraan psikologis dan ekonomi perempuan. Sebagai organisasi internasional yang fokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, UN Women bertindak untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan di Kenya. UN Women menjalankan perannya sesuai dengan teori peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Kelly-Kate S. Pease, yang mencakup peran sebagai problem solver, capacity builder, dan aid provider melalui Forum Kesetaraan Generasi, advokasi, kampanye, bantuan terkait COVID-19 hingga layanan bagi korban kekerasan selama periode 2020-2022.

Kata Kunci: *UN Women; Kekerasan Terhadap Perempuan; Kenya*

Abstract

Violence against women is a global problem that violates human rights, and is also a form of gender discrimination that is still rampant in many countries, including Kenya. Besides having impacts on global health and the economy, COVID-19 pandemic also caused an increase of violence cases against women in Kenya. This happens because of lockdown policies, social restrictions, and other factors such as economic problems, patriarchal culture, and misunderstanding of cultural practices. The impact of violence against women is not only physical ones, impacted on women's psychological and economic well-being. As an international organization that focuses on gender equality and women's empowerment, UN Women acts to address the problem of violence against women in Kenya. UN Women carries out its role in accordance with the theory of the role of international organizations put forward by Kelly-Kate S. Pease, which includes the role of problem solver, capacity builder and aid provider through the formation of Generation Equality Forum, advocacy, campaigns, aids of COVID-19, as well as services for victims of violence in between 2020-2022 period.

Keywords: *UN Women; Violence Against Women; Kenya*

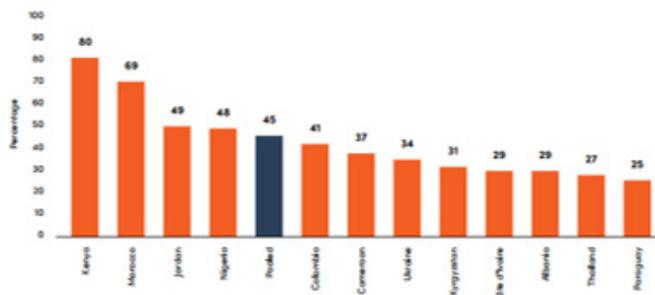
Pendahuluan

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu isu global yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi gender. UN Women (2013) menyatakan bahwa satu dari tiga perempuan atau 30% dari perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual setidaknya sekali sepanjang hidupnya. Kekerasan terhadap perempuan sendiri diartikan sebagai setiap tindakan yang terkait dengan perbedaan jenis kelamin dan dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau mental bagi perempuan. Hal ini kemudian juga meliputi ancaman terhadap tindakan semacam itu, pemaksaan, atau pembatasan tanpa hak atas kebebasan, baik yang terjadi di tempat umum atau dalam ruang pribadi (OHCHR n.d).

Krisis global pandemi COVID-19, selain berdampak langsung di bidang kesehatan dan ekonomi, juga menyebabkan kekerasan terhadap perempuan meningkat secara global. Berdasarkan laporan UN Women (2021) terungkap bahwa sekitar 45% perempuan melaporkan mengalami tindakan kekerasan selama pandemi COVID-19 tersebut. Faktor-faktor yang umumnya memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan meliputi konsumsi alkohol, tingkat pendidikan yang rendah, masalah kesehatan mental, serta ketidaksetaraan gender yang dipengaruhi oleh budaya patriarki dan dominasi maskulinitas yang melebihi peran serta posisi perempuan (World Health Organization 2021). Adapun saat pandemi COVID-19, faktor-faktor pemicu tambahan termasuk kebijakan *lockdown* dan himbuan untuk tinggal di rumah, situasi ekonomi yang sulit, dan kerawanan terhadap ketersediaan pangan (World Health Organization n.d).

Gambar 1. Proporsi Perempuan yang Melaporkan adanya Kekerasan Terhadap Perempuan sejak COVID-19

Proportion of women who reported that they or a woman they know experienced a form of VAW since the COVID-19 pandemic, by country, April–September 2021



Note: Pooled estimates refer to 12 countries, excluding Bangladesh, due to differences in field operation on the question of whether the respondent or any woman she knows had experienced VAW only since COVID-19.

Sumber: UN Women, 2021

Tabel 1. Data Gender Based Violence di Kenya dari Tahun 2016-2020.

Data Jumlah Kekerasan Berbasis Gender di Kenya				
Tahun				
2016	2017	2018	2019	2020
357	412	1.974	1.057	5.009

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Data milik UN Women (2021) juga menunjukkan bahwa Kenya memiliki angka tertinggi dalam persentase kekerasan terhadap perempuan, yakni hingga 80 persen sejak dimulainya pandemi COVID-19 pada Maret 2020. Hal ini berkaitan dengan pemberlakuan kebijakan *lockdown* serta pembatasan aktivitas sosial (National Crime Research Centre 2020). Terdapat faktor lain yang memicu kekerasan berbasis gender atau *gender based violence* (GBV) di Kenya, yakni termasuk faktor ekonomi, dominasi budaya patriarki, konflik dalam lingkungan keluarga, dan praktik budaya yang disalahartikan (National Crime Research Centre 2020). Dalam konteks Kenya sendiri, masih terdapat bentuk-bentuk umum dari kekerasan berbasis gender seperti kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan pelanggaran seksual, kekerasan fisik, *Female Genital Mutilation* atau Mutilasi Alat Kelamin Perempuan, serta kasus pembunuhan. Semua ini juga berdampak pada kondisi psikologis perempuan, karena menjadi korban yang paling banyak terkena dampaknya (National Crime Research Centre 2020).

Dalam usaha melindungi hak-hak perempuan dari diskriminasi gender di seluruh dunia, peran organisasi internasional yakni *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* (UN Women) juga dibutuhkan. UN Women adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 2010 dengan tujuan memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan salah satunya terfokus pada penanggulangan kekerasan terhadap perempuan. Adapun beberapa peran yang dilakukan UN Women dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan mencakup di tingkat internasional dengan mendukung *Commissions on the Status of Women* (CSW) dan berbagai forum internasional lainnya, memberikan akses layanan keamanan, kesehatan, dan konseling untuk perempuan dan anak perempuan, program *Safe Cities and Safe Public Spaces for Women and Girls*, serta kampanye dan advokasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan (UN Women n.d).

Penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang serupa dengan topik penelitian yakni yang pertama, jurnal dengan judul "COVID-19 dan Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pandemi Bayangan (*The Shadow Pandemic*)" (Arry Bainus dan Junita Budi Rachman 2021). Secara garis besar, penelitian dalam jurnal ini mengupas tentang fenomena pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan tindakan kekerasan terhadap perempuan, berbagai penyebab yang melatarbelakangi hal tersebut, dan upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan dengan pendekatan feminis (Bainus & Rachman 2021). Yang kedua, jurnal dengan judul "Mengkaji Peran UN Women Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme" (Iqbal Ramadhan dan Innesia Ma'sumah 2018). Secara garis besar, penelitian dalam jurnal ini mengeksplorasi bagaimana paradigma feminis berupaya mengkritisi paradigma realisme dan liberalisme dimana kedua paradigma tersebut terlalu terfokus pada keamanan nasional dan mengabaikan keamanan manusia khususnya perempuan. Berkaca pada hal tersebut, dalam penelitian ini juga mencoba menggali peran dan efektivitas dari UN Women sebagai wujud dari paradigma feminis dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan (Ramadhan & Ma'sumah 2018). Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis hendak mengkaji bagaimana peran UN Women dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kenya tahun 2020-2022.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yakni bertujuan memberikan gambaran dan mendeskripsikan suatu fenomena sosial secara komprehensif untuk menjawab pertanyaan seperti apa, siapa, dimana, kapan, atau bagaimana (Untung 2019). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, dimana metode yang merujuk pada berbagai dokumen atau sumber data tidak langsung seperti dari jurnal, laporan, internet, dokumentasi, publikasi, dan lain sebagainya (Alaslan 2021). Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu data berupa kata atau kalimat yang berkaitan dengan objek penelitian. Proses analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyusunan temuan, dan kesimpulan (Sugiyono 2013).

Landasan Teoretis

Penelitian ini menggunakan teori peran organisasi internasional dari Kelly-Kate S. Pease dalam bukunya *International Organizations Perspective on Global Governance* (2019). Peran organisasi internasional menurut Pease terbagi menjadi lima, yakni (1) *Problem Solver*, dimana organisasi

internasional berperan dalam mengatasi permasalahan dengan kerja sama kolektif yang diwujudkan dengan pembentukan forum untuk mendiskusikan suatu permasalahan; (2) *Collective Act Mechanism*, yakni peran yang dilakukan khususnya oleh organisasi internasional yang bergerak di bidang ekonomi dengan meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan global; (3) *Capacity Builder*, dimana organisasi internasional berupaya mengembangkan kapasitas yang dimilikinya untuk berperan dalam mengembangkan dan mempromosikan norma dan nilai bersama di masyarakat; (4) *Common Global Market*, dimana peran ini lebih banyak dilakukan oleh organisasi internasional perusahaan multinasional (MNC). MNC dianggap berperan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat dengan memberikan lapangan pekerjaan, industri, teknologi, dan keterampilan manajerial untuk membangun pasar global bersama; dan (5) *Aid Provider*, dimana organisasi internasional juga memiliki peran dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam, konflik, pengungsi, masyarakat miskin, atau wabah penyakit (Pease 2019).

Dalam hal penyediaan bantuan, penelitian ini lebih mengerucut pada jenis bantuan kemanusiaan atau *Humanitarian Assistance* yakni melibatkan pemberian barang atau jasa yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat dan mengurangi penderitaan akibat bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh manusia. Bantuan ini bisa bersifat jangka pendek, seperti bantuan pemulihan setelah bencana, atau bantuan kerjasama pembangunan yang mencakup langkah-langkah tanggap darurat bantuan kemanusiaan (Spieker 2010). Adapun dalam memberikan bantuan kemanusiaan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, penelitian ini berfokus pada pemberian bantuan Mitigasi & Integrasi Risiko yakni berupa bantuan dengan berfokus pada mengatasi kekerasan terhadap perempuan di sektor lainnya serta Mendukung dan melatih peningkatan layanan kekerasan berbasis gender yakni dapat berupa bantuan sistem atau bantuan penyediaan layanan lainnya (Raftery et al. 2022). Dari kelima peran tersebut, penulis menggunakan tiga peran yang relevan dalam mengatasi kekerasan berbasis gender yakni *Problem Solver*, *Capacity Builder*, dan *Aid Provider*. Adapun kedua peran lainnya yakni *Collective Act Mechanism* & *Common Global Market* tidak digunakan karena keduanya lebih terfokus pada peran organisasi internasional di bidang ekonomi (Pease 2019).

Hasil dan Diskusi

Isu kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah ketidaksetaraan gender yang signifikan dan cukup banyak terjadi di Kenya. Ketika pandemi COVID-19 pertama kali teridentifikasi di Kenya pada bulan Maret 2020,

hal ini mengakibatkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di negara tersebut. Peningkatan kasus ini berkorelasi dengan penerapan pembatasan mobilitas sosial, kondisi ekonomi, dan terganggunya kesejahteraan mental yang juga mengancam keselamatan perempuan (National Crime Research Centre 2020).

Tabel 2. . Data Gender Based Violence di Kenya Tahun 2020-2022.

Data Jumlah Kekerasan Berbasis Gender di Kenya		
Tahun		
2020	2021	2022
5.009	5.136	3.762

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan data yang ada, ketika pandemi COVID-19 teridentifikasi di Kenya, hal ini langsung menyebabkan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender di Kenya pada tahun 2020, sebanyak 5.009 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 1.057 kasus pada tahun 2019. Pada tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan menjadi 5.136 kasus, diikuti penurunan pada tahun 2022 sebanyak 3.762 kasus. Bentuk-bentuk kekerasan selama pandemi COVID-19 di Kenya sebagian besar mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual (pemeriksaan dan penyerangan seksual), Mutilasi Alat Kelamin Perempuan, dan pembunuhan, baik yang dilakukan oleh pasangan intim maupun orang lain, sehingga menimbulkan dampak psikologis terhadap perempuan (National Crime Research Centre 2020). Dalam hal ini peran UN Women dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kenya tahun 2020-2022 dilakukan dengan berperan di tiga hal yakni, *Problem Solver*, *Capacity Builder*, dan *Aid Provider*.

Peran UN Women sebagai *Problem Solver*

Menurut Kelly-Kate S. Pease, peran *problem solver* mengacu pada tindakan yang diambil oleh organisasi internasional untuk membantu negara-negara anggotanya dalam mengatasi suatu masalah melalui kerja sama kolektif. Kerja sama ini diwujudkan dengan organisasi-organisasi internasional menyediakan forum atau wadah untuk membahas permasalahan tersebut. Hal ini diwujudkan oleh UN Women dengan membentuk forum internasional yang disebut *Generation Equality Forum* (GEF) atau Forum Kesetaraan Generasi (FKG). Forum ini dibentuk

UN Women bersama Pemerintah Mexico dan Pemerintah Perancis yang diadakan di Mexico City dari tanggal 29 hingga 31 Maret 2021, dan di Paris dari tanggal 30 Juni hingga 2 Juli 2021. Tujuan utama Forum ini adalah untuk meningkatkan dan mempercepat penerapan "*The Beijing Platform for Action*" sebuah instrumen kebijakan yang diadopsi pada tahun 1995 yang dianut oleh banyak negara untuk mempromosikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan (Generation Equality, n.d).

Hasil dari forum tersebut diantaranya terdapat enam tema terpilih yang terbagi dalam Koalisi Aksi Kesetaraan Generasi yang fokus pada penanganan isu-isu terkait kesetaraan gender selama periode lima tahun hingga tahun 2026. Tema-tema tersebut adalah (1) Kekerasan Berbasis Gender; (2) Keadilan Ekonomi dan Hak-hak; (3) Otonomi Tubuh dan Kesehatan dan Hak Seksual dan Reproduksi; (4) Aksi Feminis untuk Keadilan Iklim; (5) Teknologi dan Inovasi untuk Kesetaraan Gender; dan (6) Gerakan dan Kepemimpinan Feminis. Selain enam Koalisi Aksi tersebut, FKG juga meluncurkan *Compact on Women, Peace and Security and Humanitarian Action* (WPS-HA Compact). Selain itu, hasil forum ini menghasilkan berbagai komitmen dan program dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk komitmen pendanaan sebesar \$40 miliar selama lima tahun ke depan hingga tahun 2026 (Generation Equality, n.d).

Dalam FKG, Kenya memainkan peran dengan menjadi pemimpin dalam salah satu Koalisi Aksi, yakni Koalisi Aksi Kekerasan Berbasis Gender, bersama dengan negara lainnya seperti Islandia, Inggris, dan Uruguay (Generation Equality Forum 2021). Pemilihan pemimpin tersebut dilakukan oleh kelompok inti FKG, yang mencakup perwakilan dari Koordinator Eksekutif Perempuan PBB untuk FKG, Presiden Institut Nasional Perempuan Meksiko, dan beberapa anggota *Generation Equality Youth Task Force* (UN Women 2020). Kenya terpilih sebagai pemimpin Koalisi Aksi Kekerasan Berbasis Gender karena maraknya kekerasan terhadap perempuan di negara tersebut dan komitmen yang telah banyak dilakukan sebelumnya (Generation Equality Forum 2021).

Dengan terpilihnya Kenya sebagai pemimpin dalam Koalisi Aksi Kekerasan Berbasis Gender, Kenya merasa terhormat dan menunjukkan komitmennya dengan membuat 12 komitmen untuk mengatasi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan Mutilasi Alat Kelamin Perempuan (FGM) pada tahun 2026. Komitmen ini diumumkan oleh Presiden Uhuru Kenyatta saat FKG berlangsung di Paris. Beberapa komitmen tersebut antara lain (1) Menerapkan undang-undang dan kebijakan terkait GBV dengan memasukkan indikator GBV ke dalam kerangka kontrak kinerja pemerintah untuk memantau akuntabilitas penegakan dan penerapan undang-undang dan kebijakan GBV pada tahun 2022;

(2) Menginvestasikan \$23 juta dalam pencegahan dan respons GBV pada tahun 2022 dan meningkatkan alokasi sumber daya menjadi \$50 juta pada tahun 2026; (3) Meratifikasi dan melaksanakan Konvensi ILO 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja pada tahun 2026 dan bermitra dengan sektor swasta; (4) Memperkenalkan modul tentang GBV dan FGM dalam Survei Demografi Kesehatan Kenya 2022; (5) Mengembangkan sistem manajemen dan informasi GBV untuk memperkuat program pencegahan dan respons GBV pada tahun 2022; (6) Menginvestasikan \$1 juta per tahun untuk penelitian GBV pada tahun 2026; (7) Mengintegrasikan layanan GBV ke dalam Cakupan Kesehatan Universal (UHC) pada tahun 2022; (8) Meningkatkan respons kepolisian nasional terhadap GBV dan mendirikan Pusat Pemulihan Kekerasan Berbasis Gender dan tempat penampungan di 47 kabupaten pada tahun 2026; (9) Mengadakan dana bagi para penyintas GBV melalui kemitraan dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya; (10) Mengatasi pencegahan dan respons GBV dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19, krisis kemanusiaan, atau peningkatan GBV selama pemilu; (11) Memperkuat kolaborasi dengan aktor non-negara; (12) Membentuk struktur kepemimpinan multisektoral untuk FKG Kenya dalam Koalisi Aksi Kekerasan Berbasis Gender pada tahun 2026 (Equality Now 2021).

Dari komitmen-komitmen tersebut, ada sebagian yang telah dilaksanakan dan sebagian masih dalam proses implementasi mengingat jangka waktunya hingga tahun 2026. UN Women sebagai organisasi internasional berperan sebagai *problem solver* dalam mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender secara global, termasuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. FKG merupakan wujud nyata dalam upaya penanganan ini. Forum ini berhasil mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk berkomitmen mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan, termasuk Kenya. Forum ini memberikan Kenya sebuah platform untuk menyatakan komitmennya dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan yang terus terjadi di negaranya.

Peran UN Women sebagai *Capacity Builder*

Menurut Kelly-Kate S. Pease, peran *capacity builder* melibatkan organisasi internasional untuk mengembangkan kapasitas mereka dengan memupuk norma dan nilai bersama. Dalam konteks ini, UN Women sebagai organisasi internasional yang bekerja di bidang kesetaraan gender bagi perempuan dengan terfokus pada penanganan kekerasan terhadap perempuan, berupaya untuk mempromosikan dan menumbuhkan norma dan nilai bersama yakni kesetaraan gender dan hak asasi manusia di Kenya melalui kampanye dan advokasi.

a. *Kampanye 16 Days of Activism against Gender Based-Violence Against Women & Girls*

Peran yang pertama yakni melalui kampanye. UN Women bersama dengan UNiTE membentuk kampanye global tahunan “*16 Days of Activism against Gender Based-Violence Against Women & Girls*” yang dilaksanakan setiap tanggal 25 November yang bertepatan dengan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, hingga tanggal 10 Desember yang bertepatan dengan Hari Internasional Hak Asasi Manusia. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk mendorong aksi global di seluruh pemerintah, masyarakat, organisasi yang berfokus pada perempuan, pemuda, sektor swasta, media, dan sistem PBB, untuk meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan nilai dan norma bersama dalam masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (UNiTE 2021).

Adapun implementasi dari kampanye ini di Kenya sendiri dilakukan oleh perwakilan Pemerintah Kenya dan Universitas Kabianga. (1) Kementerian Pelayanan Publik dan Gender Kenya. Kampanye yang pertama diwakili oleh Kementerian Pelayanan Publik dan Gender Kenya. Pada tahun 2020, kampanye 16 Hari Aktivisme dengan tema “*Orange the World, Fund, Respond, Prevent, Collect*”, Kementerian Pelayanan Publik dan Gender bersama mitra pembangunan dan organisasi sipil melaksanakan kampanye tersebut dengan membuat acara berbasis virtual untuk merayakan peluncuran pedoman 16 Hari Aktivisme Melawan Kekerasan Berbasis Gender dan Pusat Pemulihan Kekerasan Berbasis Gender pada tanggal 26 November 2020. Tujuan dari peluncuran pedoman tersebut karena didasari oleh peningkatan angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Kenya pada tahun 2020.

Dengan dipimpin oleh Sekretaris Utama Departemen Luar Negeri Bidang Gender, Prof. Collette Suda, pelaksanaan kampanye dengan melalui acara peluncuran pedoman ini diharapkan dapat melibatkan masyarakat dan mempromosikan kesetaraan gender, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kasus kekerasan terhadap perempuan (Kamau dan Kirimi 2020); dan (2) Universitas Kabianga. Kegiatan kampanye 16 Hari Aktivisme ini juga dilakukan oleh Universitas Kabianga dengan aksi turun ke jalan pada tanggal 28 November 2021. Dalam acara kampanye tersebut, Direktorat Gender dan Pembangunan Universitas Kabianga bekerja sama dengan sembilan pemangku kepentingan lainnya, yakni Asosiasi *Girl Guide* Kenya, James Finlay Kenya, Rumah Sakit Siloam, *Rotary Club of Kericho*, Masyarakat Palang Merah Kenya, *Brighter Communities Worldwide*, *Linda Msichana Organization*, *Lions Club of Kericho*, dan *Transform Us Kenya Kericho*. Seperti yang tergambar di atas, kampanye ini

melibatkan peserta dengan berjalan kaki dari kampus utama Universitas Kabianga menuju Kota Kericho. Selama acara kampanye, para peserta melakukan dialog publik dengan masyarakat di Pasar Kabianga, Pasar Kapkelek, dan Chebown *Center* untuk membahas pentingnya mengatasi kekerasan terhadap perempuan di masyarakat dan mendorong kesetaraan gender di sekitar Kota Kericho. Acara kampanye berakhir di Kantor Komisaris Kabupaten Kericho (Universitas Kabianga 2021).

b. Advokasi Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan

Gambar 2. Advokasi UN Women Kepada Perwakilan Ketua Adat Negara-Negara Afrika di Naivasha, Kenya.



Sumber: UN Women Africa (2021)

UN Women juga melibatkan para ketua adat Afrika dalam mengembangkan nilai dan norma bersama terkait kesetaraan gender dan hak asasi manusia terkait kekerasan terhadap perempuan. Upaya ini bertujuan untuk mengakhiri praktik-praktik seperti mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) dan pernikahan anak yang lazim terjadi di banyak negara Afrika, termasuk Kenya. Mutilasi alat kelamin perempuan dianggap sebagai peralihan dan ukuran kesiapan perempuan menghadapi kehidupan di masa depan. Namun kenyataannya, praktik ini melanggengkan kesenjangan gender dan mengakibatkan komplikasi kesehatan yang serius di sekitar alat kelamin perempuan. UN Women berkolaborasi dengan para ketua adat untuk mengatasi masalah ini dan mendorong ditinggalkannya praktik-praktik berbahaya seperti FGM dan pernikahan anak, sehingga berupaya menghilangkan kekerasan berbasis gender dan menegakkan hak-hak perempuan (World Health Organization 2023).

Hal ini dilakukan dengan UN Women bersama *Council of Traditional Leaders of Africa* (COTLA) mengadvokasi pentingnya mengakhiri praktik berbahaya tersebut kepada perwakilan beberapa ketua adat Afrika yang berlangsung pada tanggal 24 September 2021 di Naivasha, Kenya, seperti yang tertera pada gambar di atas. Melibatkan para ketua adat sangatlah penting karena peran mereka yang berpengaruh dalam membentuk dan menegakkan praktik budaya dalam masyarakat. Sehingga diharapkan para ketua adat dapat membimbing komunitas mereka agar turut serta mengakhiri praktik kekerasan terhadap perempuan. Dalam pertemuan empat hari tersebut, UN Women memfasilitasi pertukaran strategi dan diskusi mengenai tantangan terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan khususnya mutilasi alat kelamin perempuan. UN Women memberikan panduan kepada para ketua adat dalam meningkatkan kesadaran tentang bahaya kekerasan berbasis gender, mendukung para penyintas, dan mengadvokasi kesetaraan gender di komunitas mereka (UN Women Africa 2021).

Peran UN Women sebagai *Aid Provider*

Kelly-Kate S. Pease mendefinisikan peran *aid provider* sebagai tanggung jawab yang dilakukan oleh organisasi internasional untuk memberikan bantuan kepada para korban, yang mencakup bencana alam, bencana yang disebabkan oleh manusia, konflik, pengungsi, komunitas miskin, atau wabah penyakit (Pease 2019). Dukungan ini diwujudkan melalui bantuan luar negeri, termasuk bantuan kemanusiaan, yang merupakan pemberian barang atau jasa untuk menopang masyarakat dan meringankan penderitaan yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh manusia. Bantuan ini dapat bersifat jangka pendek, mencakup bantuan pemulihan atau dukungan pembangunan, yang mencakup peningkatan tindakan darurat kemanusiaan (Spieker 2010). Koordinasi bantuan kemanusiaan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan melibatkan Mitigasi & Integrasi Risiko dan Dukungan untuk Penyediaan Layanan Kekerasan Berbasis Gender (Raftery et al. 2022). Sesuai dengan teori tersebut, UN Women sebagai organisasi internasional berperan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Kenya dengan melalui Mitigasi & Integrasi Risiko, yakni bantuan pemulihan ekonomi dan dukungan COVID-19, serta bantuan Mendukung Penyediaan dan pelatihan peningkatan layanan GBV.

a. Mitigasi & Integrasi Risiko

Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor, mulai dari kesehatan, perekonomian, serta menyebabkan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan

sebagian disebabkan oleh kondisi kemiskinan yang ada di masyarakat. Perekonomian rumah tangga yang tidak memadai atau kesulitan keuangan individu dapat mengakibatkan konflik dan tindakan kekerasan, yang mana perempuan sering kali menjadi sasaran tindakan kekerasan. Situasi ini diperburuk oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan hilangnya pendapatan secara signifikan dan peningkatan kemiskinan bagi banyak orang (Mofijur et al. 2020). Di Kenya, COVID-19 juga berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan. Pada tahun 2020, bersamaan dengan terdeteksinya kasus COVID-19 di Kenya, Biro Statistik Nasional Kenya memperkirakan peningkatan angka kemiskinan dari 36,1% menjadi 64,2%, hal ini disebabkan oleh meningkatnya angka pengangguran dan berkurangnya peluang pendapatan (UNICEF 2020). Mengacu pada situasi tersebut, UN Women sebagai organisasi internasional turut berperan dalam memberikan bantuan. Bantuan ini mencakup bantuan pemulihan COVID-19 dan dukungan bantuan tunai di Kenya. Melalui Pemerintah Kenya, pada tahun 2020, UN Women memasok perlengkapan kesehatan COVID-19, antara lain 9.898 perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD), 3.038 masker, 490 botol *hand sanitizer*, dan 3.626 pasang sarung tangan untuk masyarakat dan relawan. Selanjutnya, bantuan pemulihan juga diberikan oleh UN Women melalui bantuan tunai kepada 3.000 rumah tangga yang mengalami penurunan ekonomi yang disalurkan melalui Pemerintah Kenya. Rata-rata, setiap penerima bantuan menerima sekitar 5.000 Shilling Kenya. Bantuan-bantuan tersebut dibagikan di lima Kabupaten yakni Kajiado, Garissa, Kakamega, Migori, dan Kilifi (UN Women 2021). Dalam konteks ini, peran UN Women dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Kenya sejalan dengan sudut pandang Raftery et al. (2022), dimana salah satu cara untuk mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan untuk memerangi kekerasan berbasis gender adalah melalui Mitigasi & Integrasi Risiko. Risiko yang berasal dari kekerasan berbasis gender dan COVID-19 mencakup dimensi kesehatan dan ekonomi, yang berdampak pada banyak individu yang juga berdampak ke dalam kemiskinan. Untuk mengatasi tantangan ini, integrasi risiko juga diperlukan dengan melibatkan penyediaan bantuan kesehatan dan ekonomi untuk mengatasi akar penyebab dan dampak kekerasan terhadap perempuan.

b. Dukungan Penyediaan Layanan Kekerasan Berbasis Gender

Selain mengkoordinasikan bantuan melalui Mitigasi & Integrasi Risiko, UN Women juga berperan dalam mendukung layanan kekerasan berbasis gender dan meningkatkan layanan tersebut melalui pelatihan. Layanan bagi penyintas kekerasan disediakan oleh Pemerintah Kenya yakni *hotline* layanan telepon bebas pulsa 1195 yang bekerja sama dan didukung oleh UN Women. Bantuan telepon ini dilaksanakan oleh organisasi lokal

Healthcare Assistance Kenya (HAK) yang didirikan oleh Kementerian Pelayanan Publik dan Gender Kenya (Ministry of Public Service, Gender, and Affirmative Action, n.d). Dalam layanan *hotline* 1195, HAK melalui para tele-konselor yang terlatih terutama menawarkan panduan dalam mengakses layanan medis, menghubungi polisi, atau memberikan dukungan psikososial bagi para korban melalui konseling jarak jauh untuk mengurangi rasa takut dan trauma bagi para penyintas. Dukungan UN Women dalam penyediaan layanan *hotline* 1195 melibatkan pelatihan 17 tele-konselor dan pendistribusian informasi tentang layanan tersebut melalui brosur seperti pada gambar di atas (UN Women 2021).

Bantuan lain juga dilakukan UN Women dalam meningkatkan layanan GBV melalui program yang diluncurkan pada tahun 2019 bertajuk “*Let It Not Happen Again*”, sebuah upaya kolaboratif yang melibatkan UN Women, *Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR), dan *Italian Agency for Development Cooperation* (Aics). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pencegahan dan respons terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual, di empat wilayah: Nairobi, Kisumu, Bungoma, dan Vihiga. Kabupaten-kabupaten ini diidentifikasi sebagai lokasi dengan tingginya insiden kekerasan seksual berbasis gender (UN Human Rights 2021). Pada tahap pertama program ini (2019-2021), beberapa hasil yang dicapai mencakup pembentukan Direktorat Gender di Kepolisian Nasional Kenya, peningkatan kapasitas di sektor peradilan, keamanan, dan kesehatan untuk mencegah dan menangani masalah kekerasan seksual berbasis gender, dan peningkatan akses terhadap layanan (Italian Agency for Development Cooperation 2022).

Melanjutkan program yang sama, seperti terlihat pada diagram di atas, pada tanggal 12 April 2022, program tersebut diperpanjang melalui acara penandatanganan oleh Duta Besar Italia untuk Kenya, Alberto Pieri, dan Direktur Regional UN Women untuk Afrika Timur dan Selatan, Maxime Houinato, di Nairobi, Kenya. Program lanjutan ini diberi nama “*Let It Not Happen Again: Enhancing Prevention and Response to Violence Against Women in Elections*”. Di Kenya, peningkatan kasus kekerasan berbasis gender tidak hanya disebabkan oleh COVID-19. Faktor lain yang berkontribusi adalah pemilu yang berujung pada tindakan kekerasan. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, terdapat laporan mengenai sejumlah kasus kekerasan fisik dan seksual berbasis gender dengan perempuan sebagai korban utama. Acara penandatanganan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Badan Kerjasama Pembangunan Italia di Nairobi, Giovanni Grandi, Perwakilan UN Women untuk Kenya, Anna Mutavati, perwakilan Kementerian Pelayanan Publik dan Gender, *Senior Citizen Affairs &*

Special Programmes, perwakilan dari Kepolisian Nasional, perwakilan dari OHCHR, dan perwakilan dari Masyarakat Sipil (Italian Agency for Development Cooperation 2022).

Implementasi dari program tersebut yakni pada tanggal 26 Juli 2022, terdapat pelatihan untuk peningkatan layanan kepolisian dalam rangka mengatasi kekerasan berbasis gender dengan melatih petugas polisi untuk menjelang pemilu. Seperti pada gambar di atas, pelatihan diberikan kepada 141 komandan polisi tentang manajemen keamanan pemilu di Kabupaten Kilifi. Selain itu, pelatihan juga dilakukan terhadap 846 petugas polisi lainnya di daerah rawan kekerasan selama pemilu, termasuk Kilifi, Mombasa, Kisumu, dan Nakuru. Selama sesi pelatihan ini, petugas polisi menerima bimbingan tentang menjaga ketertiban umum, mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu. Keterlibatan polisi dalam program ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk melindungi individu dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (UN Women Africa 2022).

Gambar 3. Pelatihan Operator Ojek dalam Meningkatkan Kepekaan Layanan Respon Kekerasan Berbasis Gender di Wilayah Kakuma.



Sumber: United Nations Kenya (2022)

Peran lainnya dari UN Women dalam meningkatkan layanan kekerasan berbasis gender di Kenya juga dilakukan dengan pemberian pelatihan kepada 30 operator ojek yang diadakan pada tanggal 17 November 2022. Seperti pada gambar di atas, UN Women Kenya bekerjasama dengan Honda Motorcycle Kenya Ltd dan Asosiasi Otomotif Kenya untuk memberikan

pelatihan yakni memberikan edukasi mengenai keselamatan jalan raya, kepatuhan berlalu lintas, dan pentingnya respon terhadap insiden kekerasan berbasis gender yang dilaksanakan di Landasan Udara Kakuma. Alasan pelibatan operator ojek dalam pelatihan ini karena mereka sering menjadi tujuan utama bagi korban dalam mencari bantuan ketika terjadi kasus kekerasan berbasis gender. Sebagai hasil dari program pelatihan ini, sekitar 3.000 pengendara terdaftar di Koperasi Sepeda Motor Kakuma untuk mengikuti pelatihan lebih lanjut. Peningkatan partisipasi laki-laki dalam program ini disambut positif oleh perwakilan UN Women, Idil Absiye, karena hal ini menandakan lebih banyak keterlibatan laki-laki dalam upaya kolaboratif untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan (United Nations Kenya 2022).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya pandemi COVID-19 dan juga beberapa penyebab lainnya seperti budaya patriarki, praktik budaya yang disalah artikan, dan faktor ekonomi, memberikan dampak pada adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan, tidak terkecuali di negara Kenya. Untuk mengatasi hal tersebut, peran organisasi internasional seperti UN Women diperlukan untuk menangani permasalahan tersebut. Maka dari itu, UN Women berperan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kenya tahun 2020-2022 yang mana jangkauan tahun tersebut merupakan era pandemi COVID-19 yang mengakibatkan peningkatan angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Kenya. Peran *problem solver* diwujudkan oleh UN Women dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kenya dengan membentuk Forum Kesetaraan Generasi di tahun 2021. Forum ini membantu Pemerintah Kenya menghasilkan komitmen-komitmen untuk mengatasi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan mutilasi alat kelamin perempuan.

Adapun peran *capacity builder* dilakukan oleh UN Women yakni tercermin dalam upayanya untuk mengembangkan nilai dan norma bersama di masyarakat melalui kampanye 16 Hari Aktivisme dan pesan advokasi melalui siaran televisi serta komunikasi dengan para ketua adat. Terakhir, peran UN Women sebagai *aid provider* diberikan dengan terfokus pada mitigasi & integrasi risiko dengan memberikan bantuan pemulihan COVID-19 dan transfer tunai sebagai cara UN Women membantu masyarakat Kenya menghadapi dampak pandemi dan kekerasan terhadap perempuan. Di samping itu, dalam memberikan bantuan dukungan penyediaan layanan diwujudkan dengan mendukung layanan *hotline* 1195 dan pelatihan untuk aparat kepolisian dan operator ojek sebagai respon meningkatkan layanan kekerasan berbasis gender di Kenya. Peran-peran yang dilakukan tersebut berkontribusi pada peningkatan kesadaran, pencegahan, dan penanggulangan kekerasan berbasis gender di negara tersebut.

Referensi

Buku atau Artikel dalam Buku

- Alaslan, A. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali pers.
- Pease, K.-K. S. 2019. *International Organizations Perspective on Global Governance*. New York: Routledge.
- Spieker, H. 2010. The Right to Give and Receive Humanitarian Assistance. In H. Heintze, & A. Zwitter, *International Law and Humanitarian Assistance*. Berlin: Springer.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Untung, M. S. 2019. *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Sosial*. Yogyakarta: Litera.

Jurnal Artikel

- Bainus, A., & Rachman, B. 2021. "Editorial: Covid-19 dan Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai Pandemi Bayangan (The Shadow Pandemic)", *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(2): 173-186.
- Mofijur, M., et al. 2020. "Impact of COVID-19 on the social, economic, environmental and energy domains: Lessons learnt from a global pandemic", *Sustain Prod Consum*, 343-359.
- Raftery, P., et al. 2022. "Gender-based violence (GBV) coordination in humanitarian and public health emergencies: a scoping review", *Conflict and Health*, 16-37.
- Ramadhan, I., & Ma'sumah, I. 2018. "Mengkaji Peran UN Women dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan gender Melalui Perspektif Feminisme", *Jurnal Asia Pacific Studies*, 2(2): 144-160.

Laporan Penelitian

- UNICEF, 2020. *Country Office Annual Report 2020: Kenya*. UNICEF.
- UN Women, 2021. *Measuring The Shadow Pandemic: Violence Against Women During Covid-19*. UN Women.

Publikasi Resmi

National Crime Research Centre, 2020. *Protecting the Family in the Time of COVID-19 Pandemic: Addressing the Escalating Cases of Gender Based Violence, Girl Child*. Nairobi: National Crime Research Centre.

Ministry of Public Service and Gender, 2021. *STATEMENT ON INCREASED GENDER BASED VIOLENCE IN THE COUNTRY*. Nairobi: Ministry of Public Service and Gender.

National Crime Research Centre, 2021. *2021 Kenya Annual Crime Year Book*. Nairobi: National Crime Research Centre.

Publikasi Daring

Equality Now, 2021. "Status Of Women's And Girls' Rights In Kenya, 26 Years After Kenya Committed To The Promotion Of Gender Equality" [Online]. Dalam https://www.equalitynow.org/press_release/gef_kenya_sgbv_july_2021/#:~:text=Commit%20to%20investing%20USD%201%20million%20annually%20for,of%20the%20Universal%20Health%20Coverage%20UHC%20by%202022. [Diakses pada 16 Juli 2023].

Generation Equality Forum, 2021a. "Action Coalitions – Leadership Structures. UN Women" [Online]. Dalam <https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2020-12/UNW%20Action%20Coalitions%20-%20AC%20Leaders%20-%2017%20December%202020.pdf> [Diakses pada 16 Juli 2023].

Generation Equality Forum, 2021b. "Generation Equality Forum: Draft Actions. Generation Equality Forum" [Online]. Dalam <https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/Generation%20Equality.Draft%20Actions.8%20March%202020%20-%20VF.pdf> [Diakses pada 16 Juli 2023].

Generation Equality, n.d., "About" & "Actions Coalition" [Online]. Dalam <https://forum.generationequality.org/about> [Diakses pada 15 Juli 2023].

Italian Agency for Development Cooperation, 2022. "Kenya – Italy and UN WOMEN renew their commitment to fight gender-based violence in Kenya" [Online]. Dalam <https://nairobi.aics.gov.it/en/2022/7123/> [Diakses pada 25 Juli 2023].

- Kamau, C., & Kirimi, J. 2020. "Ministry of Public Service, Gender, and Affirmative Action, from Ministry Launches 16 Days of Activism Against Gender Based Violence and Gender Based Violence Recovery Center Guidelines" [Online]. Dalam <http://www.psyg.go.ke/?p=3149> [Diakses pada 20 Juli 2023].
- Ministry of Public Service, Gender, and Affirmative Action, 2023. "Gender Based Violence 1195 Hotline" [Online]. Dalam <https://gender.go.ke/healthcare-assistance-kenya-hak-1195/> [Diakses pada 20 Juli 2023].
- OHCHR, 2023. "Declaration on the Elimination of Violence against Women" [Online]. Dalam <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women> [Diakses pada 10 Januari 2023].
- Teyie, S. 2023 "Star Kenya: Over 3,762 cases of GBV were reported in 2022 - lobby" [Online]. Dalam <https://www.the-star.co.ke/news/realtime/2023-01-23-over-3762-cases-of-gbv-were-reported-in-2022-lobby/> [Diakses pada 22 Juli 2023].
- UN Human Rights, 2021. "Inside Kenya's Social Justice Centres – and the human rights defenders that run them" [Online]. Dalam <https://unhumanrights.medium.com/inside-kenyas-social-justice-centres-and-the-human-rights-defenders-that-run-them-b0f21f5e097e> [Diakses pada 25 Juli 2023].
- UNiTE, 2021. "UN Women: Concept Note for Engagement: 16 Days of Activism against Gender-Based Violence Against Women & Girls 25 November - 10 December 2021" [Online]. Dalam <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2021-11/UNiTE-campaign-2021-concept-note-en.pdf> [Diakses pada 20 Juli 2023].
- University of Kabianga, 2020. "ACTIVISM AGAINST GENDER-BASED VIOLENCE" [Online]. Dalam <http://kabianga.ac.ke/main/article/activism-against-gender-based-violence#> [Diakses pada 24 Juli 2023].
- University of Kabianga, 2021. "CAMPAIGN WALK TO RAISE AWARENESS AGAINST GBV" [Online]. Dalam <http://kabianga.ac.ke/main/article/campaign-walk-raise-awareness-against-gbv> [Diakses pada 23 Juli 2023].

- United Nations Kenya, 2022. "UN Women Kenya trains motorcycle taxi operators on safety and GBV prevention and response" [Online]. Dalam <https://kenya.un.org/en/218341-un-women-kenya-trains-motorcycle-taxi-operators-safety-and-gbv-prevention-and-response> [Diakses pada 25 Juli 2023].
- UN Women, n.d., "About UN Women" [Online]. Dalam <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women> [Diakses pada 7 Januari 2023].
- UN Women, 2013. "UN Women: Ending Violence Against Women" [Online]. Dalam https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/12/UN%20Women%20EVAW-ThemBrief_US-web-Rev9%20pdf.pdf [Diakses pada 10 Maret 2023].
- UN Women, n.d., "Facts and figures: Ending violence against women" [Online]. Dalam <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures> [Diakses pada 10 Maret 2023].
- UN Women, 2020. "UN Women. Retrieved August 3, 2023, from Announcement of the Global Leaders of the Generation Equality Action Coalitions to accelerate gender equality" [Online]. Dalam <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/announcer-global-leaders-of-the-generation-equality-action-coalitions-to-accelerate-gender-equality> [Diakses pada 3 Agustus 2023].
- UN Women Africa, 2020. "COVID-19: UN Women Supports Kenya's National Helpline for Survivors of Sexual and Gender-Based Violence" [Online]. Dalam <https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/06/on-the-frontline-with-kenyas-national-helpline> [Diakses pada 25 Juli 2023].
- UN Women Africa, 2021. "Being silent is no longer an option: traditional leaders of Africa intensify their efforts to end child marriage, female genital mutilation and other harmful practices" [Online]. Dalam <https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2021/09/being-silent-is-no-longer-an-option-traditional-leaders-of-africa> [Diakses pada 23 Juli 2023].
- UN Women Africa, 2022. "Police training rolled out across Kenya ahead of elections: <https://africa.unwomen.org/en/stories/news/2022/07/police-training-rolled-out-across-kenya-ahead-of-elections> [Diakses pada 25 Juli 2023].

World Health Organization, 2021. “Devastatingly pervasive: 1 in 3 women globally experience violence” [Online]. Dalam <https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence#:~:text=The%20regions%20of%20Oceania%2C%20Southern%20Asia%20and%20Sub%20Saharan,%2818%25%29%2C%20Eastern%20Asia%20%2820%25%29%20and%20South-Eastern%20> [Diakses pada 3 April 2023].

World Health Organization, n.d., “Levels of domestic violence increase globally, including in the Region, as COVID-19 pandemic escalates” [Online]. Dalam <https://www.emro.who.int/violence-injuries-disabilities/violence-news/levels-of-domestic-violence-increase-as-covid-19-pandemic-escalates.html> [Diakses pada 28 Februari 2023].

World Health Organization. “Female Genital Mutilation” [Online]. Dalam <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation> [Diakses pada 23 Juli 2023].

Video atau Film

Kanyi, E., & Marchant, D. L. 2022. *Kenya's Hidden Epidemic* [Motion Picture]. Kenya: BBC News Africa